

Evaluasi kebijakan penugasan khusus tenaga kesehatan ke daerah perbatasan di Propinsi Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur tahun 2007

Muhamad, Nur

Deskripsi Lengkap: <https://lib.fkm.ui.ac.id/detail.jsp?id=64043&lokasi=lokal>

Abstrak

Dalam upaya untuk pemerataan pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat, pendayagunaan tenaga kesehatan secara rasional sangat diperlukan. Pemerintah mengatur penempatan tenaga kesehatan melalui program penugasan khusus ke daerah perbatasan. Upaya pemetaan dan penempatan tenaga melalui penugasan khusus untuk ditugaskan di fasilitas kesehatan seperti Rumah Sakit, Puskesmas, di daerah terpencil, daerah rawan bencana konflik dan perbatasan mempunyai nilai strategis dalam menyelenggarakan program kesehatan.
Peran dan keberadaan tenaga medis sangat besar pengaruhnya dalam pemeriksaan dan mutu pelayanan kesehatan, sehingga Departemen Kesehatan mengembangkan kebijakan tenaga medis melalui Masa Bakti dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1988 tentang Masa Bakti dan Praktek Dokter dan Dokter Gigi sebagai pelaksanaan dari ketentuan tersebut diterbitkan Keputusan Presiden daerah sehingga masih adanya kesenjangan antara jumlah kebutuhan dan jumlah tenaga medis yang berminat dan mau ditugaskan di daerah terpencil sangat terpencil, perbatasan dan pulau terluar.
Penugasan khusus tenaga kesehatan ke daerah perbatasan tidak dapat secara langsung mengakibatkan keberhasilan penurunan angka mortalitas dan mobilitas, karena penduduk di daerah perbatasan sangat kecil sehingga tidak berpengaruh terhadap perubahan angka mortalitas dan angka mobilitas. Asumsi asumsi masih menggunakan kebijakan-kebijakan penempatan tenaga medis dalam keadaan khusus seperti keadaan bencana, konflik, daerah terpencil, masa bakti dan era lain.
Saran utama yang diajukan kepada pembuat kebijakan adalah penyusunan kebutuhan tenaga kesehatan di daerah perbatasan harusnya tidak hanya berdasarkan tuntutan kompetensi jenis tenaga yang dibutuhkan tetapi perlu dilakukan secara terpadu (integrated) dan memperhatikan berbagai faktor terutama kondisi wilayah daerah dengan asas desentralisasi sesuai kemampuan dan kondisi daerah. Segera dibahas dan dibentuk kebijakan khusus tentang penempatan khusus tenaga kesehatan di daerah perbatasan. Pola pengembangan karier tenaga kesehatan pasca penugasan perlu dilakukan secara seimbang antara kepentingan organisasi dengan kepentingan tenaga medis itu sendiri baik jangka pendek maupun jangka panjang.